



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 yang memuat VISI dan MISI, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan telah dilakukan penyempurnaan.

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

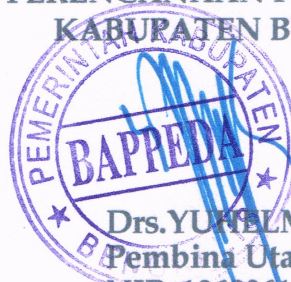
Dalam penyusunan perencanaan strategis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi unsur pimpinan, unsur pembantu (sekretariat) dan unsur pelaksana (bidang) dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

Perubahan Rencana Stretegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati periode 2016-2021.

Bengkalis, Juli 2019

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



Drs. YURELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis	II - 1
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis	II - 8
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis	II - 12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis.....	II - 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA.....	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III - 2
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau.....	III - 4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 8
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	III - 10

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV - 2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1



Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2018	II - 8
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Menurut Jabatan Tahun 2018	II - 9
Tabel 2.3	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	II - 9
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Penjurangan Tahun 2018.....	II - 10
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	II - 10
Tabel 2.6	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015.....	II - 14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015.....	II - 18
Tabel 3.1	Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	III - 4
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau.....	III - 7
Tabel 3.3	Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis	III - 8
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Analisis KLHS.....	III - 10
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	IV - 3
Tabel 5.1	Penilaian Analisa SWOT	V - 2
Tabel 5.2	Formulasi Strategi SWOT.....	V - 4

Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V - 5
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis.....	VI - 2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 2



Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021	I - 2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	II - 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

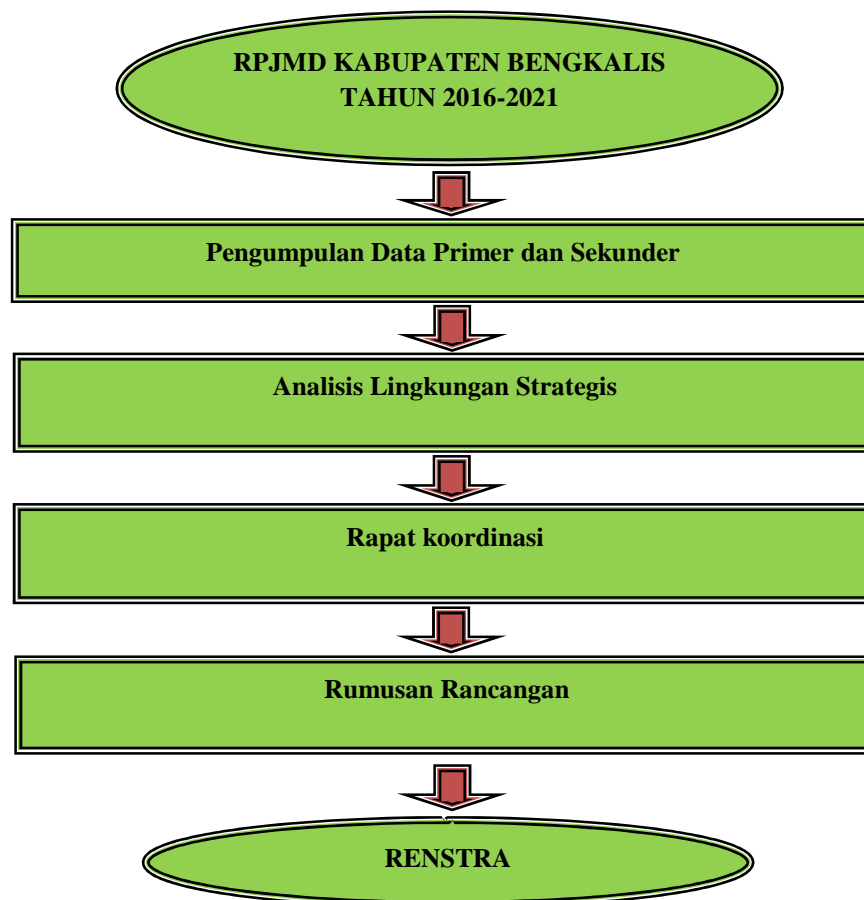
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappedda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappedda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Bappedda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappedda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten

Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”.

Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu disusun berdasarkan pada fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang perencanaan. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/ eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan Renstra dan penetapannya. Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Menyadari akan hal tersebut sebagai salah satu Perangkat Daerah, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk periode 5 (lima) tahunan juga berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 dimaksud untuk menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021.

Adapun yang menjadi tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. Mengendalikan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis

- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkulu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bengkulu

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

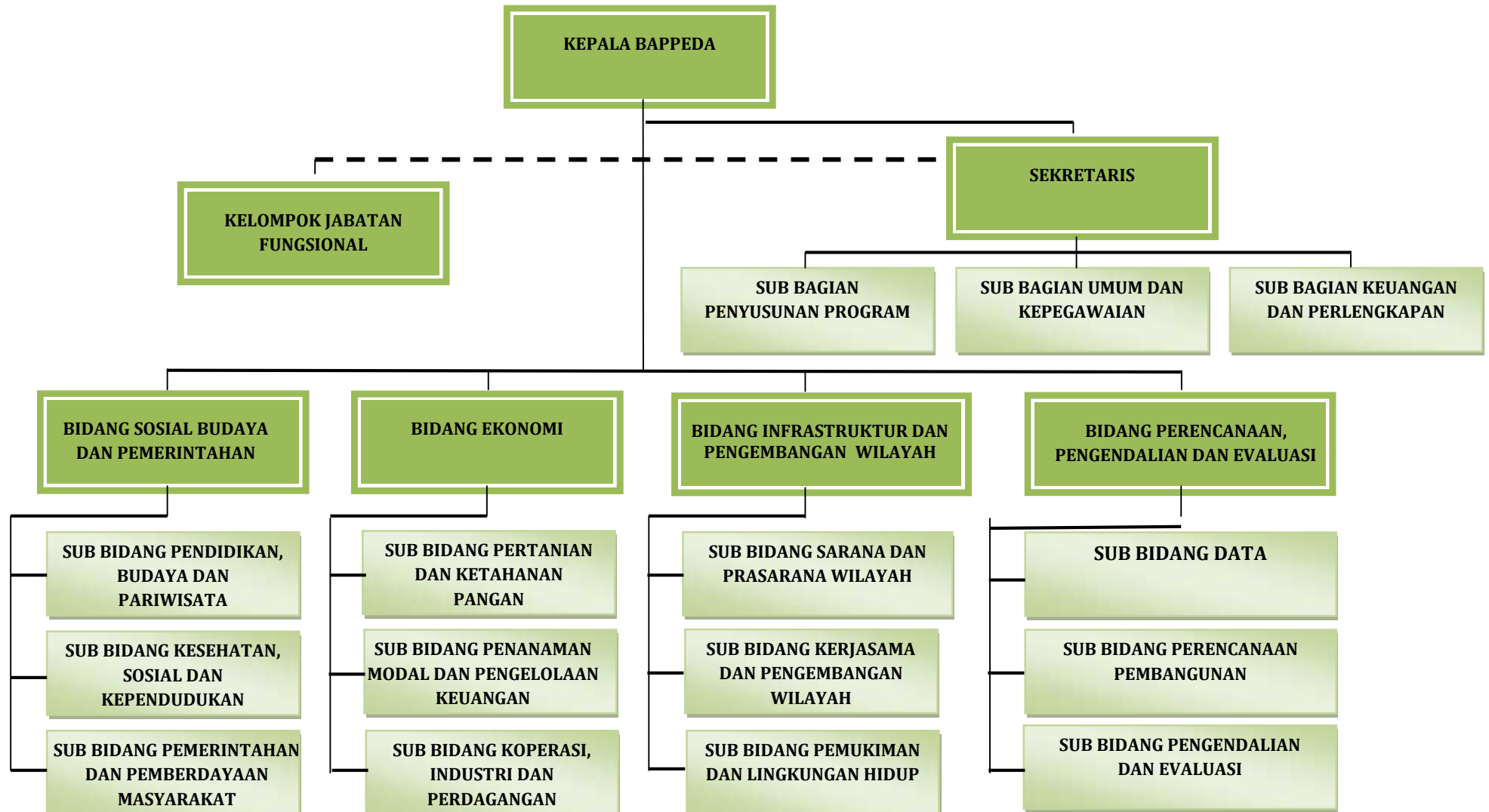
Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, Bappeda memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Sub Bidang Koperasi, Industri dan perdagangan.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :
 - a. Sub Bidang Data;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala Bappeda juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan penyelarasan kesesuaian dokumen Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- h. Pelaksanaan penyelarasan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di Bidang Ekonomi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Ekonomi;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ekonomi;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Ekonomi;
- d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Ekonomi;
- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi;
- f. Pelaksanaan penyelarasan kesesuaian renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Ekonomi;
- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi;
- h. Pelaksanaan penyelarasan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Ekonomi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Pelaksanaan penyesuaian kesesuaian renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Pelaksanaan penyesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah RPJPD/RPJMD/RKPD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - f. Pelaksanaan penyesuaian kesesuaian dokumen renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- h. Pelaksanaan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah RPJMD di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkulu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu didukung oleh 58 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu didominasi oleh golongan III yang berjumlah 43 orang, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 11 orang.

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2018

No.	Golongan Ruang Gaji	Jumlah
1	Gol. IV	5
2	Gol. III	43
3	Gol. II	11
4	Gol. I	-
Jumlah		58

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2018

- b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselonering

Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bengkulu yang berjumlah 58 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Menurut Jabatan Tahun 2018

No.	Jabatan/ Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Staf/Non Struktural	37
Jumlah		58

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2018

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkulu, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 33 orang.

Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Jabatan/ Eselon	Jumlah
1.	Sarjana Starata III (S3)	-
2.	Sarjana Starata II (S2)	11
3.	Sarjana Strata I (S1)	33
4.	Diploma	1
5.	SLTA Sederajat	12
6.	SLTP	1
Jumlah		58

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2018

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 18 Orang.

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bengkulu
Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan Penjejeangan	Jumlah
1.	Diklatpim IV	13
2.	Diklatpim III	3
3.	Diklatpim II	2
4.	Diklatpim I	-
Jumlah		18

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2018

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Disamping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Bengkulu Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/ Unit/ Buah)	
1.	Tanah	n/a	Ha
2.	Gedung	1	Unit
3.	Ruang Rapat	2	Ruangan
4.	Kendaraan Roda 4	12	Unit
5.	Kendaraan Roda 2	47	Unit
6.	GPS	3	Unit
7.	Mesin Tik	2	Buah
8.	Mesin Fotocopy	2	Buah
9.	Lemari Besi	6	Buah
10.	Lemari Kayu	15	Buah
11.	Filling Besi/ Metal	20	Buah
12.	Kursi Roda/tangan	46	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/ Unit/ Buah)	
13.	Camera Film	1	Buah
14.	Alat Penghancur Kertas	7	Unit
15.	Genset	1	Buah
16.	Televisi	15	Buah
17.	Kulkas	2	Buah
18.	AC	39	Buah
19.	Laptop	42	Buah
20.	Dispenser	1	Buah
21.	Printer	52	Buah
22.	Wireless	4	Buah
23.	Microphone	1	Buah
24.	Mic Conference	1	Buah
25.	Stabilisator	2	Buah
26.	Handy Cam	1	Buah
27.	Alat Rumah Tangga	10	Buah
28.	Alat Pemadam	4	Buah
29.	Komputer PC	23	Buah
30.	Server	1	Buah
31.	Router	2	Buah
32.	Camera + Attachment	1	Buah
33.	Proyektor + Attachment	1	Buah
34.	UPS	15	Unit
35.	Peralatan Studio	3	Unit
36.	Off Air TV Monitor	1	Buah
37.	Slide Projector	4	Buah
38.	Telephone (PABX)	5	Buah
39.	Faksimili	3	Buah
40.	CCTV	1	Buah
41.	Alat Keamanan	1	Buah
42.	Vacum Cleaner	3	Buah
43.	Meja Rapat	5	Buah
44.	Peralatan Jaringan	7	Buah
45.	Meja Tulis	17	Buah
46.	Lemari Buku	1	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/ Unit/ Buah)	
47.	Kursi Rapat	7	Buah
48.	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
49.	Rak Besi/Metal	1	Buah
50.	Lemari Kaca	1	Buah
51.	Papan Tulis	1	Buah
52.	Mesin Absensi	1	Buah
53.	Rak Kayu	2	Buah
54.	Tempat Tidur Kayu	1	Buah
55.	Meja Makan	2	Buah
56.	Meja Makan	2	Buah
57.	Meja Reseption	1	Buah
58.	Meja Tambahan	2	Buah
59.	Meja Panjang	1	Buah
60.	Kursi Tamu	3	Buah
61.	Kursi Putar	12	Buah
62.	Mesin Potong Rumput	1	Buah
63.	Kipas Angin	2	Buah
64.	Mimbar/Podium	1	Buah
65.	Ploter	1	Buah
66.	Hard disk	1	Buah
67.	Peralatan Komputer	2	Buah
68.	Meja Kerja Pejabat Eselon	6	Buah
69.	Meja Operatorq	2	Buah
70.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	7	Buah
71.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	Buah
72.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	4	Buah

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

Selain itu, kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk mendukung kinerja tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda, maka berikut disajikan pencapaian kinerja dan Pendanaan Bappeda selama Tahun 2010 – 2015 masing-masing pada Tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-					
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor yang Berkualitas	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio perlengkapan kantor terhadap kebutuhan pekerjaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan	40	100	120	140	160	0	2	3	2	3	0	2	2,50	1,43	1,88	
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90	90	90	90	90	75	100	87,97	100	62,50	83,33	111,11	97,74	111,11	69,44	
5.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja	90	90	95	100	100	38	43	40	52	78	42,22	47,78	42,11	52,00	78,00	
6.	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
7.	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
8.	Tersedianya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA															
9.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
10.	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
11.	Pertumbuhan PDRB	7,43	7,81	7,92	7,94	8	7,49	7,67	7,87	7,26	N/A	100,81	98,21	99,37	91,44	0
12.	PDRB Per Kapita (Rp)	38.470.758,29	44.731.683,21	52.731.683,21	60.592.763,76	70.591.600,55	35.802.454,37	35.579.582,40	46.164.069,38	46.662.643,21	N/A	93,06	79,54	88,70	77,01	0
13.	Tersedianya Pusat Data	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
14.	Terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bengkulu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
15.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	90	90	90	90	90	73	77	79	84	90	81,11	85,56	87,78	93,33	100,00
16.	Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	50,00	50,00	0	0	0
17.	Ketaatan terhadap RTRW	65	75	85	90	95	68	74	77	82	87	104,62	98,67	90,59	91,11	91,58

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		SKPD Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi	90	90	90	90	90	75	80	83	87	90	83,33	88,89	92,22	96,67	100,00
19.	Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Ekonomi	1	0	2	0	1	1	0	1	0	1	100,00	0	50,00	0	100,00
20.	Laju Inflasi	7,00	7,00	6,50	6,00	5,50	1,04	7,02	6,17	8,71	N/A	14,86	100,29	94,92	145,17	0
21.	Pertumbuhan Ekonomi	7,79	7,76	7,86	7,89	7,97	7,49	7,67	7,72	7,26	N/A	96,15	98,84	98,22	92,02	0
22.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Kesra dan Sosial Budaya	90	90	90	90	90	70	75	80	85	90	77,78	83,33	88,89	94,44	100
23.	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90	90	90	77	79	83	85	90	85,56	87,78	92,22	94,44	100,00
24.	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencana	-	1	3	2	1	0	0	2	5	3	0	0	66,67	250	300

Sumber : Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2011-2015

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011-2015 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015. Penetapan target kinerja tersebut dilakukan menunjukkan kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis didalam pemenuhan layanan SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan.

Berdasarkan tabel 2.6 realisasi pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015 secara keseluruhan telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa indikator kinerja yang telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) indikator yang justru belum mencapai target kinerja, yaitu jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan, penjabaran program Renstra ke dalam Renja dan belum tersedianya pusat data. Ketiga indikator tersebut belum dapat mencapai target kinerja, antara lain yaitu

- 1) Minimnya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek perencanaan dan alokasi anggaran yang belum memadai untuk mengikuti bimtek perencanaan tersebut;
- 2) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD, baik pada program maupun kegiatan yang dilaksanakan;
- 3) Belum adanya pusat data terkait perencanaan sehingga masih terdapatnya perbedaan data yang diperoleh dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015

NO.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.336	2.814	2.869	2.696	3.169	3.336	2.102	2.234	2.138	1.945	2.141	2.646	89,98	79,39	74,52	72,14	67,56	79,32
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.095	1.703	5.260	3.897	3.008	1.804	1.005	1.150	4.623	3.219	2.134	1.336	91,78	67,53	87,89	82,60	70,94	74,06
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	201	653	502	753	0	0	164	484	148	461	0	0	81,59	74,12	29,48	61,22
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	20	0	154	0	0	0	12	0	124	0	0	0	60,00	0	80,52	0	0
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	549	1.079	161	0	0	0	544	929	110	0	0	0	99,09	86,10	68,32	0	0	0
6.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	629	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	94,44	0	0	0	0	0
7.	Program Kerja Pembangunan	0	250	513	1.072	1.095	211	0	134	252	871	759	154	0	53,60	49,12	81,25	69,32	72,99
8.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	253	679	687	293	1.353	1.029	197	129	302	141	526	311	77,87	19,00	43,96	48,12	38,88	30,22
9.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	0	0	0	857	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	80,16	0	0
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.031	809	1.032	1.620	1.806	1.512	878	556	574	1.347	1.494	1.336	85,16	68,73	55,62	83,15	82,72	88,36
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.494	1.315	3.098	4.821	3.705	2.535	3.975	840	1.982	3.009	2.268	1.104	88,45	63,88	63,98	62,41	61,21	43,55
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.587	1.462	734	1.233	839	904	2.382	1.144	571	958	546	574	92,08	78,25	77,79	77,70	65,08	63,50

NO.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.033	273	547	949	889	530	907	125	139	293	316	348	87,80	45,79	25,41	30,87	35,55	65,66
14.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.497	4.636	2.094	420	591	1.427	2.190	3.288	1.475	185	263	877	87,71	70,92	70,44	44,05	44,50	61,46
15.	Program Perencanaan Tata Ruang	919	330	223	0	1.609	793	704	109	0	0	1.275	615	76,61	33,03	0	0	79,24	77,55
16.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0	0	598	989	670	73	0	0	552	631	0	71	0	0	92,31	63,80	0	97,26
Total Anggaran		17.423	15.370	18.017	19.654	19.236	14.907	15.478	10.650	12.882	13.894	11.870	9.833	88,84	69,29	71,50	70,69	61,71	65,96

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2010 - 2015

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan pelayanan memiliki tantangan dan peluang. Adapun tantangannya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pendukung pelayanan;
2. Belum meratanya kualitas perencanaan bagi aparatur;
3. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD;
5. Belum proporsionalnya usulan yang bersumber dari perencanaan partisipatif, teknokratik dan politis.

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur Bappeda;
5. Adanya pembinaan baik dari instansi pusat seperti Bappenas dan Ditjen Bangda maupun pemerintah provinsi yakni Bappeda Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perencanaan;
6. Keterbukaan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
3. Masih rendahnya pemenuhan prasarana pendukung pelayanan;

4. Rendahnya kapasitas dan pemahaman aparaturnya terkait perencanaan;
5. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
7. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021, maka yang menjadi visi Kabupaten Bengkalis yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU
DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut adalah berikut:

- MODEL NEGERI** : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.
- MAJU** : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

MAKMUR : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat didukung oleh Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, yaitu "**Meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah**". Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah Meningkatkan Keselarasan Pembangunan.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan	Perencanaan	Bappeda

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

3.3.1 Rencana Strategis PPN/Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas memiliki visi dan misi guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu **“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel”**. Visi tersebut dapat dicapai dengan didukung oleh misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel; dan
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP.
- 2) Sasaran strategis dari tujuan kedua “Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

3.3.2 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau

Bappeda Provinsi Riau memiliki visi, yaitu “Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas”. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dapat

dicapai melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencana serta Kapasitas Kelembagaan Menuju Lembaga Perencanay Profesional;
3. Peningkatan Pengelolaan Data Perencanaan yang Valid serta dapat Dipertanggungjawabkan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Perencana;
3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengahnya yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan;
2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana;
3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.

Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan dan sasaran untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional dan provinsi yang telah dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau. Berdasarkan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Riau maka terdapat faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis akan dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis

Sasaran Renstra Bappenas	Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan Kabupaten Bengkalis	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendukung
(1)		(2)	(3)	(3)
<p>1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;</p> <p>2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RPJMN;</p> <p>3. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RKP;</p> <p>4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan; aparatur perencana;</p> <p>2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana;</p> <p>3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan</p>	<p>1. Belum terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pemerintah, maupun antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana daerah;</p> <p>2. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal;</p> <p>3. Keterbatasan data yang valid dan berkualitas</p>	<p>1. Adanya kebijakan dan kewenangan terkait perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat dan pemerintah provinsi yang masih tumpang tindih;</p> <p>2. Belum optimalnya fungsi kerja sistem perencanaan berbasis online/elektronik yang terintegrasi;</p> <p>3. Masih kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholders</i> terkait data</p>	<p>1. Adanya peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja;</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur Bappeda;</p> <p>3. Adanya keinginan bersama antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penyeragaman data</p>

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budidaya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Tabel 3.3
Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Telaahan	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(3)
Implikasi RTRW	Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk :

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis 2011-2030 secara konseptual ditujukan untuk mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan wilayah, membentuk dan memperkuat jejaring pusat-pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam konstelasi regional dan nasional, membentuk dan memperkuat fungsi pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan secara berjenjang, terintegrasi dan terpadu, dan membuka daerah terisolasi dengan mempromosikan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah daratan, pesisir dan kepulauan (Rupat dan Bengkalis) sebagai PKLp, PPK dan PPL.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Analisis KLHS

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(3)
Pelaksanaan program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Layanan informasi penataan ruang	Adanya perbedaan batas wilayah yang diatur dalam Permendagri dan Perda RTRW	Sudah adanya sistem berbasis Citra dan kajian rencana rinci

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan sehingga isu-isu strategis nantinya akan menentukan kinerja pembangunan yang dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Adapun perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan aspek berikut yaitu;

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Bappenas;
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Bappeda Provinsi Riau
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Isu-isu strategis yang telah disajikan berdasarkan aspek di atas akan direview secara singkat sebagai berikut :

1. **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**
Telah tercapainya target kinerja di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis pada periode sebelumnya, terkecuali pada indikator jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan, penjabaran program Renstra ke dalam Renja dan belum tersedianya pusat data. Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur Bappeda, serta keterbukaan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
2. **Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Bappenas**
Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah perencanaan yang terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. **Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Bappeda Provinsi Riau**
Sasaran strategis dalam Renstra Bappeda Provinsi Riau yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan, meningkatnya kompetensi aparatur perencana dan tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.
4. **Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis**
Rencana Tata Ruang Wilayah adalah produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai acuan dalam segala bentuk perencanaan pembangunan pada perencanaan tata ruang yang berlaku.
5. **Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis**
Implikasi dari KLHS adalah Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan perencanaan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, maka harus dilakukan KLHS.

Berdasarkan penjelasan dari aspek di atas dan dikaitkan dengan pelayananan Bappeda Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas perencanaan baik melalui dokumen perencanaan maupun SDM Bappeda;
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan secara intensif antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan efisien, serta selalu diperbaharui dengan perkembangan terkini;
4. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses publik;
5. Perlu adanya konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan yang akan datang;
7. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Bappeda

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka Bappeda Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas”**

Penjelasan Visi:

1. **Perencanaan Pembangunan** memiliki makna penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien
2. **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait kebutuhan pembangunan daerah terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan dari visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan.

Tugas pokok dan fungsi Bappeda dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, maka untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dan rasional dari tujuan yang telah ditetapkan selama periode 2016-2021 dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Predikatkinerja RKPD	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%	95%	98%	100%	100%	100%	
				- Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%	88%	92%	96%	100%	100%	
				- Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	-	-	-	-	85%	88%	91%	91%
			2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	- Persentase pemenuhan data Pembangunan	9,15%	9,15%	30%	40%	45%	50%	55%	55%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					- Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60 %	-	-	-	-	52	28	70	70
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Predikat kinerja akuntabilitas	3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Predikat kinerja akuntabilitas	C	CC	B	BB	BB	A	A	A
					Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan Bappeda dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan;
 - c. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan dibangun dan dikembangkan lebih partisipatif;

2. Kelemahan/ *Weakness* (W)
 - a. Belum memadainya jumlah fungsional perencanaan, penelitian dan pengkajian;
 - b. Belum optimalnya *basic data* dalam proses perencanaan;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - d. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang, serta dengan Perangkat Daerah .
3. Peluang/*Opportunity*
 - a. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Adanya kesempatan untuk mengikuti bimtek perencanaan untuk meningkatkan kualitas SDM perencana;
 - d. Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Ancaman/ *Threats* (T)
 - a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
 - b. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi;
 - c. Masih tumpang tindihnya peraturan terkait perencanaan;
 - d. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan.

Tabel 5.1
Penilaian Analisa SWOT

Analisa Lingkungan Internal (*Strength & Weakness*)

Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai	4
	2.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan	4
	3.	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4
	TOTAL		12

Kelemahan (Weakness)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Belum memadainya jumlah fungsional perencanaan, penelitian dan pengkajian	2
	2.	Belum optimalnya <i>basic data</i> dalam proses perencanaan	3
	3.	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang, serta dengan Perangkat Daerah	3
		TOTAL	8

Analisa Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (Opportunity)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data	3
	2.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah	4
	3.	Adanya kesempatan untuk mengikuti bimtek perencanaan untuk meningkatkan kualitas SDM perencana	4
	4.	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4
		TOTAL	15

Ancaman (Threat)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi	3
	2.	Masih tumpang tindihnya peraturan terkait perencanaan	3
	3.	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan	2
		TOTAL	10

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Berdasarkan tabel penilaian analisa SWOT diatas, maka peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.

Tabel 5.2
Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATS)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah 3. Adanya kesempatan untuk mengikuti bimtek perencanaan untuk meningkatkan kualitas SDM perencana 4. Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas
KEKUATAN (STRENGTH)	S-O	S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai 2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan 3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerjasama dengan OPD atau pihak lain yang terkait 2. Mengoptimalkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Optimalisasi penggunaan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan 2. Memanfaatkan SDM Bappeda yang memiliki keahlian dalam pengelolaan data dan informasi untuk mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan
KELEMAHAN (WEAKNESS)	W-O	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya jumlah fungsional perencanaan, penelitian dan pengkajian 2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi 3. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang, serta dengan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan Monitoring Evaluasi 2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan data perencanaan 3. Meningkatkan kerjasama dengan OPD -OPD lain dalam analisa data informasi proses perencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi 2. Meningkatkan teknologi informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi 3. Meningkatkan koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah

Secara lebih rinci strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai misinya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peningkatan pembangunan dengan memperhatikan rencana prioritas	1. Melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah
		2. Peningkatan pembangunan yang berkualitas	2. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
			3. Melakukan keserasian rencana kebijakan nasional dan provinsi terhadap rencana kebijakan kabupaten
	2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan	1. Peningkatan pemenuhan data pembangunan	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan data
2. Melaksanakan kerjasama pemenuhan data			
Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas			
Misi II : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	1. Peningkatan kualitas kinerja	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan internal
			2. Meningkatkan kualitas kompetensi ahli bagi aparatur
		2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	1. Meningkatkan tertib penatausahaan keuangan dan aset
			2. Meningkatkan Kualitas rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang dan jasa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkalis secara rinci dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA													
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	Nilai	Rendah	Rendah		Sedang		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi			
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	Orang	150	150	679.000.000	170	550.000.000	190	500.000.000	190	450.000.000	190	450.000.000	190	550.000.000		
			Sosialisasi RPJMD	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	-	-	0	450	450.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
			Revisi RPJPD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen RPJPD	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	1	200.000.000	-	0	-	0		
			Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	Dokumen	-	-	0	-	0	1	250.000.000	-	0	-	0	-	0		
			Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	2	2	88.000.000	3	170.000.000	2	300.000.000	2	250.000.000	2	490.000.000	2	500.000.000		
			Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen RPJMD	Dokumen	-	1	1.250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
			Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	Dokumen	-	1	466.500.000	-	0	-	0	-	0	1	910.000.000	-	0		
			Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	Perangkat Daerah	0	43	320.000.000	46	450.000.000	46	775.000.000	46	470.000.000	46	670.000.000	46	883.000.000		
			Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen revisi RPJMD	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	1	750.000.000	-	0	-	0		
			Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah dokumen rancangan teknokratis RPJMD	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	700.000.000	-	0		
			Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Jumlah RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	1.200.000.000		
			2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	
					Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia	Laporan	8	8	210.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%			85	90		95		98		100		100		100				
Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Ekonomi	Laporan			8	8	71.000.000	8	50.000.000	11	75.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	300.000.000			
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%			85	90		95		98		100		100		100				
Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Laporan			8	8	165.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Laporan			-	-	0	8	200.000.000	11	80.000.000	11	200.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sarana dan Prasarana	Laporan	8	8	217.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Laporan	-	-	0	8	232.500.000	11	70.000.000	11	251.000.000	11	170.000.000	11	300.000.000
		3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKP	Nilai	Rendah	Rendah		Sedang		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kali	-	-	0	20	500.000.000	20	550.000.000	80	650.000.000	80	550.000.000	80	680.000.000
			Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	%	-	-	0	-	0	-	0	85	450.000.000	87	500.000.000	91	500.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	Kali	16	18	500.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Kali	20	20	330.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kali	-	-	0	20	430.000.000	20	500.000.000	80	807.000.000	80	660.000.000	80	660.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Ekonomi	Kali	20	20	370.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	70	700.000.000	70	550.000.000	70	650.000.000
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90		95		98		100		100		100	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Sarana dan Prasarana	Kali	16	20	320.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kali	-	-	0	20	490.000.000	20	464.000.000	80	723.000.000	80	600.000.000	80	660.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	78	80		88		92		96		100		100	
			Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	-	1	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	100.000.000
			Review Renstra SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan review terhadap dokumen renstra	Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	46	320.000.000	-	0	-	0	-	0
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	80	83		87		91		95		100		100	
			Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	415.000.000
		4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	-	-		-		-		85		88		91	
			Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Pasca MDG's	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan	Kali	3	3	115.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan Kota Ibukota Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penataan kota ibukota kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	-	0	1	600.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan daerah	Kali	-	-	0	-	0	-	0	10	700.000.000	5	700.000.000	12	700.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kali	-	-	0	-	0	-	0	-	0	8	410.000.000	12	500.000.000
			Penyusunan kelayakan usulan kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	Usulan	-	-	0	-	0	-	0	1.100	150.000.000	1.100	550.000.000	1.100	550.000.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	-	-		-		-		85		88		91	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kali	300	350	1.309.500.000	350	935.000.000	350	937.000.000	350	939.000.000	350	1.300.000.000	350	1.300.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	-	-	-	-	-	-	85	-	88	-	91	-	-
			Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi program pansimas tingkat kabupaten	Kali	11	430.000.000	10	380.000.000	11	400.000.000	9	210.000.000	5	220.000.000	7	300.000.000	
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PPSP	Kali	6	300.000.000	5	75.000.000	3	50.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	5	150.000.000	
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase luas ruang wilayah yang sesuai peruntukannya	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
			Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKP	Kali	-	0	2	150.000.000	2	50.000.000	3	110.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	
			Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	Kali	-	0	17	150.000.000	-	0	25	120.000.000	20	100.000.000	25	150.000.000	
			Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	Kali	-	0	15	250.000.000	11	250.000.000	100	250.000.000	-	0	-	0	
			Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah kegiatan/pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW	Kali	-	0	-	0	3	200.000.000	-	0	-	0	-	0	
			Pemutakhiran Data RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen basis data RTRW Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	0	1	108.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkalis	Kali	-	0	5	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Frekuensi konsultasi publik revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Kali	-	0	-	0	12	350.000.000	12	350.000.000	-	0	-	0	
			Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah rancangan Perda RTRW dan naskah akademik Ranperda RTRW	Dokumen	-	0	-	0	-	0	2	65.000.000	-	0	-	0	
			Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen materi teknis RTRW Kabupaten hasil revisi	Dokumen	-	0	1	650.000.000	1	650.000.000	-	0	-	0	-	0	
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase perumusan kebijakan pendukung pembangunan KEK di Pulau Rupat	%	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	87	-	-
			Studi kelayakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KEK Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000	1	530.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90	95	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	Kali	5	500.000.000	5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	78	80	88	92	96	96	96	96	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Keberlanjutan Pelaksanaan TKPKD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukannya pemantauan/ pertemuan pengutan kelembagaan	Kali	3	3	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG'S	%	-	60	150.000.000	65	110.000.000	75	100.000.000	81	150.000.000	82,5	155.000.000	85,08	250.000.000
			Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	%	-	-	0	70	100.000.000	-	0	-	0	-	0	75	250.000.000
			Koordinasi Penyediaan Kegiatan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat	Jumlah pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	Kali	-	-	0	3	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	Kali	-	-	0	3	120.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Forum Kabupaten Sehat	Jumlah pertemuan lintas instansi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	Kali	-	-	0	-	0	5	190.000.000	3	247.000.000	2	100.000.000	3	270.000.000
			Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah program kabupaten yang mendukung capaian rencana aksi nasional	Program	-	-	0	-	0	-	0	-	0	3	300.000.000	-	0
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Kesesuaian prioritas nasional dengan daerah untuk bidang ekonomi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	93	-
			Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Rekomendasi	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	150.000.000	3	100.000.000	3	250.000.000
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian prioritas nasional dengan daerah untuk bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	93	-
			Kajian Pengembangan Program Wilayah Terpadu (PWT) Kabupaten Bengkalis	Persentase terwujudnya perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabilitas	%	-	75	25.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah JAKSTRADA SPAM Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	-	0	1	348.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKRASDA) SPAM Kabupaten Bengkalis	Persentase terlaksananya kebijakan strategis air minum di Kabupaten Bengkalis	%	-	100	507.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil/ Bukit Batu	Jumlah pertemuan forum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	Kali	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3	200.000.000
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90	-	95	-	98	-	100	-	100	-	100	-
			Fasilitasi Program Bidang Keciaptakaryaan	Jumlah fasilitasi dan sinkronisasi program per tahun	Kali	3	3	209.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	85	90	-	95	-	98	-	100	-	100	-	100	-
			Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	Jumlah dilakukan survey dan monitoring pemanfaatan ruang	Kali	12	15	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Pemetaan Tata Batas Kota 8 Ibukota Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	Persentase ketersediaan data tata batas Kabupaten Bengkalis	%	-	100	800.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	Persentase penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	%	60	100	209.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5. Persentase pemenuhan data pembangunan	Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data pembangunan	%	9,15	9,15		30		40		45		50		55	
			Penyusunan Profil Daerah	Jumlah profil Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	-	0	1	100.000.000	1	275.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD	%	-	-	0	30	120.000.000	50	100.000.000	65	130.000.000	70	250.000.000	80	400.000.000
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data sektoral	%	-	100		100		100		100		100		100	
			Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Laporan	-	-	0	1	450.000.000	1	50.000.000	1	400.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000
			Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Laporan	-	-	0	1	460.000.000	1	410.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
			Profil Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen profil pembangunan manusia Kabupaten Bengkalis		-	-	0	1	550.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan	%	9,15	9,15		30		40		50		60		70	
			Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Laporan	1	1	435.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Laporan	1	1	665.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	80	83		87		91		95		100		100	
			Penyusunan laporan kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	1	400.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data Pembangunan	%	9,15	9,15		30		40		45		50		55	
			Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	-	0	1	433.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Konsultasi Regional (Konreg) PDRB	Persentase updating tahunan data PDRB	%	-	-	0	-	0	-	0	73	300.000.000	-	0	-	0
			Penyusunan laporan Capaian IKU kabupaten Bengkalis	Persentase pemenuhan data IKU	%	-	-	0	-	0	-	0	75	300.000.000	-	0	-	0
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pemenuhan data ekonomi	%	-	-		-		-		-		100		100	
			Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Persentase tersedianya data pembangunan ekonomi kerakyatan	%	-	100	370.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Inventarisasi Sumber Daya Ekonomi Sektoral Daerah Berbasis Geography Information System (GIS)	Persentase terlaksananya kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Ekonomi Sektoral Daerah Berbasis Geography Information System (GIS)	%	-	-	0	100	827.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah elemen data sektoral ekonomi yang dipublikasikan	Item	-	-	0	-	0	-	0	1	200.000.000	-	0	1	170.000.000
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase pemenuhan data sosial dan budaya	%	-	-		-		-		-		77		89	
			<i>Social Mapping</i>	Jumlah elemen data sosial wilayah	Item	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	100.000.000	4	600.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Analisa Data Sumber Daya Manusia	Jumlah elemen data sumber daya manusia	Item	-	-	0	-	0	-	0	-	0	3	50.000.000	3	715.000.000
		6.	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian data pembangunan Laporan Laporan	% 1 -	- 1 -	- 150.000.000 0	- 150.000.000 0	- 1 -	- 150.000.000 0	- 1 -	- 100.000.000 0	- 100.000.000 0	75 - 1	- 0 350.000.000	80 - 1	- 0 600.000.000
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	7.	Predikat kinerja akuntabilitas													
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat kinerja akuntabilitas	Nilai	C	CC			B	BB		BB		A		A	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	Dokumen	-	-	0	-	0	5	30.000.000	7	250.000.000	8	250.000.000	8	500.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja akuntabilitas	Nilai	C	CC			B	BB		BB		A		A	
			Pengelolaan Website	Persentase data Informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi public	%	-	81	115.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0	3	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi SOP Perencanaan	Jumlah dokumen SOP Bappeda Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	Dokumen SOP	- -	- -	0 0	1 -	200.000.000 0	1 -	200.000.000 0	- -	0 0	- 4	0 300.000.000	- -	0 0
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data perencanaan	%	9,15	9,15		30		40		50		60		70	
			Pengelolaan Website	Persentase data Informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi public	%	-	-	0	85	120.000.000	90	120.000.000	100	165.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
			Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskah dinas	Unit	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	200.000.000	-	0
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat keahlian	%	65	67		73		77		81		85		87	
			Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Orang	65	30	325.500.000	30	325.000.000	30	325.000.000	30	325.000.000	30	450.000.000	30	450.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA partnership	Orang	-	6	350.000.000	6	200.000.000	6	150.000.000	6	250.000.000	-	0	-	0
			Workshop Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Orang	-	56	367.000.000	-	0	-	0	-	0	60	350.000.000	-	0
			Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	-	100	124.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah ASN/Non ASN yang diikutsertakan dalam pengembangan kerjasama SDM	Orang	-	-	0	-	0	-	0	-	0	30	700.000.000	30	700.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		8. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan barang habis pakai dan jasa sesuai rencana kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	Surat	1.500	1.500	65.400.000	1.500	66.000.000	1.500	66.500.000	1.500	67.000.000	1.500	10.000.000	1.500	10.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	%	85	90	292.000.000	90	471.600.000	90	472.000.000	90	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	88	90	50.700.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Orang	9	9	207.500.000	9	208.500.000	9	209.000.000	20	209.500.000	20	210.000.000	20	210.500.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Item	33	33	563.000.000	33	573.000.000	33	573.500.000	33	450.000.000	33	500.000.000	33	500.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Item	15	15	98.500.000	15	98.500.000	15	98.500.000	15	98.500.000	15	98.500.000	15	98.500.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	Item	22	22	60.500.000	22	65.500.000	22	67.000.000	22	67.500.000	22	67.500.000	22	68.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	20	20	75.000.000	20	77.000.000	20	78.000.000	20	78.000.000	20	78.000.000	20	78.000.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan kantor	Box	1.200	1.400	140.000.000	1.500	145.000.000	1.500	145.000.000	1.500	90.000.000	1.500	90.000.000	1.500	90.000.000
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Orang	6	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	9	172.800.000	9	172.800.000	9	172.800.000
			Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah sopir kantor	Orang	1	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	2	38.400.000	2	38.400.000	2	38.400.000
			Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Media	-	-	0	65	39.000.000	65	39.000.000	65	120.000.000	65	120.000.000	65	120.000.000
			Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	Orang	-	-	0	1	36.000.000	1	36.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	0	0
			Unit Kearsipan	Persentase dokumen/arsip penting yang tertata dan terpelihara	%	-	-	0	-	0	-	0	-	0	70	350.000.000	77	350.000.000
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	Orang	-	-	0	-	0	-	0	-	0	2	45.000.000	2	45.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	1	1		1		0		0		0		0	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Unit	-	-	0	-	0	-	0	13	1.695.000.000	3	65.000.000	8	1.250.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Item	-	-	0	5	83.000.000	5	145.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	3	150.000.000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Item	1	3	386.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	23	1.183.000.000	5	1.320.000.000	5	180.000.000
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	Item	-	-	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	300.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	Kali	-	-	0	-	0	-	0	-	0	7	45.000.000	7	45.000.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	Kali	15	15	448.500.000	15	448.500.000	15	448.500.000	15	448.500.000	15	448.500.000	15	448.500.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	Kali	25	25	481.500.000	25	495.500.000	25	495.500.000	25	495.500.000	25	495.500.000	25	495.500.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	Kali	35	35	230.000.000	35	230.000.000	35	230.000.000	40	230.000.000	40	230.000.000	40	230.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	SATUAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	-	-	0	-	0	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000	2	7.348.231.000	2	1.100.000.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase barang yang layak pakai	%	100	100		100		100		100		100		100	
			Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	Unit	-	-	0	-	0	12	37.000.000	9	38.000.000	12	39.000.000	12	39.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
- Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	78%	80%	88%	92%	96%	100%	100%	100%
- Predikat kinerja RKPD	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi BAPPEDA di masa mendatang.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkulu ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”